



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **H. DASWIR TANJUNG**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **481295**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.178.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/70 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 427 m2/70 m2 di INDRAGIRI HULU, HASIL SENDIRI Rp. 228.100.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/84 m2 di KOTA PEKANBARU, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 95.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 235.257.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.358.266**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.524.715.266**III. HUTANG** Rp. 166.660.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.358.055.266

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.